

### **BAB III**

### **PERAN HAJJAH RANGKAYO RASUNA SAID PADA MASA KOLONIAL (1926-1945)**

Pelaksanaan tanam paksa yang menurut peraturannya pada tahun 1870 sudah dihapuskan di seluruh Jawa dan Sumatera, ternyata untuk jenis tanaman kopi masih diberlakukan sampai dengan tahun 1908 di Sumatera Barat.<sup>1</sup> Pada tahun tersebut Belanda berencana menghapuskan penanaman kopi dan akan menggantinya dengan *belasting* (pajak). Hal ini membuat rakyat meradang hingga muncul ketegangan yang puncaknya menimbulkan perlawanan yang kemudian dikenal dengan *perang belasting* (perang pajak)<sup>2</sup>.

Bentuk perlawanan rakyat diatas turut diimbangi dengan modernisasi masyarakat Minangkabau terutama dalam pola berpikirnya. Saat itu, wadah untuk mengorganisir massa belum terbentuk seperti organisasi-organisasi yang ada di Jawa, seperti Budi Oetomo<sup>3</sup>. Masyarakat disini belum begitu banyak yang terlibat dalam suatu organisasi politik, sehingga masyarakat Minangkabau menaruh perhatian dan cara pandang yang lebih kepada mereka, khususnya jika bidang itu dilakukan oleh perempuan.

---

<sup>1</sup> Mardjani Martamin, dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. (Tanpa nama kota: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977-1978), hlm. 55.

<sup>2</sup> *Perang Belasting* pada dasarnya timbul karena rakyat Minangkabau ingin mempertahankan daerahnya sendiri. Rakyat harus membayar pajak terhadap tanah yang notabene adalah milik mereka sendiri. Lihat Mardjani Martamin, dkk, *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>3</sup> Budi Oetomo atau Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa STOVIA. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tanggal berdirinya kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lihat Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 30-32.

Keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan sudah dimulai sejak dekade 1800-an yakni dengan munculnya tokoh-tokoh perintis pergerakan wanita seperti Raden Ayu Ageng Serang, Cut Nyak Dien, dan Cut Meutia.<sup>4</sup> Perjuangan yang mereka lakukan selain berkaitan dengan penjajahan, juga terkait dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Rasuna Said merupakan salah satu diantaranya, selama masa pendudukan Belanda hingga Jepang, ia aktif berkecimpung dalam beberapa organisasi, bidang pendidikan serta jurnalistik.

#### **A. Perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said di Bidang Organisasi**

##### **1. Sarekat Rakyat**

Sarekat Rakyat merupakan cikal bakal dari Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini dalam perkembangannya berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI). SI didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di kampung Lawean, Solo pada tahun 1912. Tujuan utama SI ialah menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama. Agama Islam digunakan dan merupakan faktor pengikat serta penyatu kekuatan pedagang Islam.<sup>5</sup>

Sarekat Islam (SI) merupakan organisasi pergerakan keagamaan yang pertama lahir di Sumatera Barat sebagai cabang dari Sarekat

---

<sup>4</sup> Mudijono, (2006). Peran Wanita dalam Berpolitik, *Jantra*, Volume 1 No. 2, hlm. 108. Raden Ajeng Kustiah Retno Edi atau Nyi Ageng Serang (1752-1828) lahir di desa Serang. Ia turut berperang melawan Belanda dan bergabung dalam pasukan Diponegoro. Cut Meutia (1870-1910) lahir di Keureutoe, Pirak, Aceh Utara. Ia berjuang melawan Belanda bersama Teuku Muhammad. Setelah suaminya dihukum mati, ia menikah lagi dengan Pang Nagroe. Lihat Julinar Said dan Trisna Wulandari, *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*. (Jakarta: Sub. Direktorat Sejarah, 1995), hlm. 3-13.

<sup>5</sup> Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyka, 1990), hlm. 33.

Islam di Jawa. Empat tahun setelah berdirinya Sarekat Islam di Jawa yakni tahun 1916, organisasi ini dengan cepat sudah ada di Sumatera Barat.

Sarekat Islam di Jawa mulai terkena aliran sosialisme kiri yang menyebabkan perpecahan, tepatnya saat memasuki tahun 1917. Sarekat Islam terbagi menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Tahun 1923 Sarekat Islam Merah dipenuhi orang-orang beraliran komunis<sup>6</sup> yang berkedok Islam, kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat.<sup>7</sup>

Rasuna Said mengawali karir politiknya pada tahun 1926 dengan bergabung dalam Sarekat Rakyat.<sup>8</sup> Ia memasuki organisasi politik untuk pertama kalinya pada usia 16 tahun. Sarekat Rakyat waktu itu memang banyak menarik minat kalangan muda Minang. Organisasi ini menggalang partisipasi dan kekuatan masyarakat untuk melawan

---

<sup>6</sup> Komunis merupakan pengikut paham komunisme. Komunisme ialah suatu paham yang berlandaskan kepada atheisme, menjadikan materi sebagai asas segalanya. Aliran yang berdasarkan pertarungan kelas dan faktor ekonomi ini lahir di Jerman atas ajaran Karl Marx dan Fredrich Engels. Lihat A. Najiuloh, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*. (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Utama, 2002), hlm. 199.

<sup>7</sup> Mardjani Martamin, dkk, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>8</sup> Jajang Jahroni, *Haji Rangkayo Rasuna Said: Pejuang Politik dan Penulis Pergerakan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 76.

penjajahan Belanda. Rasuna Said saat itu duduk dalam kepengurusan sebagai penulis atau disebut sekretaris, cabang Maninjau.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil Kongres Nasional ketujuh yang dilaksanakan tanggal 17-20 Februari 1923 di Madiun.<sup>10</sup> Kongres memutuskan bahwa Central Sarekat Islam (CSI) diganti menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Partai Sarekat Islam menggabungkan diri dengan Permuafakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Pemberian nama PSI kemudian ditambah kata “Indonesia” sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1927.<sup>11</sup>

Pasca menjadi partai, anggota SI terdiri dari anggota-anggota inti Sarekat Islam lama yang masih aktif atau disebut *wargorumeuko* (*wargo* = warga; *rumeuko* = proteksi, perlindungan) dan yang tidak gencang loyalitasnya kepada partai. Rasuna Said pun tetap memegang posisi di pimpinan pusat PSII cabang Maninjau, dengan Haji Udin Rahmani sebagai pemimpin untuk wilayah Sumatera Barat pada tahun 1929.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kamajaya, *Sembilan Srikandi Pahlawan Nasional*. (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1982), hlm. 77.

<sup>10</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 146. Penulisan Partai Sarekat Islam Indonesia selanjutnya akan menjadi PSII.

<sup>11</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 37-38.

<sup>12</sup> White, Sally, *Rasuna Said: Lioness of the Indonesian Independence Movement*. (Singapore: NUS Press, 2013), hlm. 105.

## 2. Persatuan Muslimin Indonesia

Rasuna Said memiliki minat dan pengetahuan yang tinggi akan dunia politik. Hal ini didukung dengan bakat dan kepandaianya yang tumbuh sejak berada di bangku sekolah. Ia telah tercatat sebagai anggota Sarekat Rakyat dalam usia yang masih muda, meski demikian dirinya masih ingin mencoba bergabung dengan organisasi lain. Rasuna Said memiliki jiwa seorang pemimpin yang jujur, ikhlas dan suka berterus terang, namun tetap pandai menjaga rahasia.

Rasuna Said memilih masuk organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PMI atau Permi) pada tahun 1930.<sup>13</sup> Permi didirikan oleh perhimpunan “Sumatra Thawalib” atau murid-murid Sumatera dibawah naungan Sekolah Thawalib. Pembentukan organisasi ini berdasarkan hasil konferensi pada tanggal 22-27 Mei 1930 di Bukittinggi.<sup>14</sup> Permi aktif bergerak dalam bidang pendidikan.<sup>15</sup> Rasuna Said dengan demikian menjadi anggota dari dua organisasi yang berbeda yaitu Sarekat Rakyat dan Permi.

Berdasarkan hasil Kongres Nasional Sarekat Islam keenam yang diselenggarakan pada akhir tahun 1921, disepakati adanya disiplin partai. Disiplin partai yaitu larangan untuk merangkap organisasi atau

---

<sup>13</sup> Penulisan Persatuan Muslimin Indonesia selanjutnya akan menjadi Permi.

<sup>14</sup> Kamajaya, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Tanggal 1 Mei 1931, Permi mendirikan *Islamic College* di Padang, suatu lembaga pendidikan tingkat menengah yang memmberi tempat penting bagi ilmu pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Lihat Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 173.

partai selain Sarekat Islam.<sup>16</sup> Rasuna Said dikenai peraturan tersebut karena menjadi anggota diluar Sarekat Rakyat. Ia pun harus memilih salah satu, kemudian diputuskan bahwa ia tetap menjadi anggota Permi, dengan kata lain keluar dari PSII.<sup>17</sup>

Permi awalnya bernama organisasi *Thawalib*, pada tahun 1929 organisasi ini memperluas keanggotaannya pada semua bekas pelajar dan guru-guru Sekolah *Thawalib* yang tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan lembaga pendidikan tersebut. Satu tahun kemudian organisasi *Thawalib* mengubah namanya menjadi Persatuan Muslimin Indonesia.<sup>18</sup>

Sumatera Barat yang selama ini dikenal sebagai benteng kuat ajaran Islam, ternyata tidak sedikit dimasuki berbagai ideologi. Haji Datuk Batuah<sup>19</sup> diketahui telah “mengawinkan” ajaran Islam dan komunis pada bulan November 1923 di kalangan *Thawalib*.<sup>20</sup> Terdapat pula persilangan antara ajaran Islam dan kebangsaan yang dipelopori oleh dua mahasiswa asal Minang yang belajar di Al Azhar,

---

<sup>16</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>17</sup> Kamajaya, *loc.cit.*

<sup>18</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>19</sup> Haji Datuk Batuah (1895-akhir 1940-an) lahir di kota Lawas, dekat Padang Panjang. Setelah menamatkan Sekolah Kelas II, ia belajar di Mekah selama 6 tahun (1909-1915). Ia berguru pada Haji Rasul dan menjadi asistennya di Perguruan *Thawalib*. Lihat Mardjani Martamin, dkk, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>20</sup> Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 4*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 146.

Kairo. Ilyas Ya'kub<sup>21</sup> kembali ke tanah air tahun 1929 dan Muchtar Luthfi<sup>22</sup> tahun 1931. Mereka bergabung dengan Sekolah *Thawalib* sebagai guru serta mulai mengambil alih pimpinan Permi.<sup>23</sup>

Kongres Permi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober sampai 1 November 1931 di Padang. Kongres tersebut menghasilkan keputusan bahwa Permi menyatakan diri sebagai partai politik.<sup>24</sup> Pasal 3 Anggaran Dasarnya menetapkan dasar pergerakan politiknya berlandaskan Islamisme dan Nasionalisme dengan haluan radikal non-koperasi.<sup>25</sup> Transformasi dari organisasi yang bersifat sosial menjadi partai politik tersebut, merupakan hasil usaha dari Ilyas Ya'kub dan Muchtar Luthfi.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Ilyas Ya'kub (1903-1958) lahir di Asamkumbang, Painan, Sumatera Barat. Menamatkan Sekolah Dasar Pemerintah dan bekerja sebagai juru tulis. Melanjutkan pendidikannya ke Mekah tahun 1921 dan Al Azhar, Kairo. Ia terkenal dalam bidang sosial, politik, dan jurnalistik. Lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. (Singapore: Oxford University Press, 1973), hlm. 153-154.

<sup>22</sup> Muchtar Luthfi (1901-1950) lahir di Bukittinggi. Putra dari H. Abdul Lathief Rasyidi. Luthfi alumni Sekolah Dasar Pemerintah dan Sumatra *Thawalib* hingga Al Azhar, Kairo. Ia terkenal sebagai orator politik dan juru dakwah. Lihat Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 65.

<sup>23</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 147. Lihat juga Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, *op.cit.*, hlm. 60.

<sup>24</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 279.

<sup>25</sup> ANRI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 807, *Surat Pengusulan Penganugerahan Gelar Pahlawan*, hlm. 2. Non-koperasi berarti tidak bekerjasama dengan pemerintah Hindia-Belanda.

<sup>26</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, *op.cit.*, hlm. 170.

Konsep ajaran Islam dan nasionalisme menjadi daya tarik bagi Permi, keduanya diibaratkan sebagai dua kaki yang menjamin keseimbangan dan keharmonisan. Bulan Agustus 1933 anggota Permi berjumlah 10.000 anggota,<sup>27</sup> 40% diantaranya adalah perempuan, dan diantara 86 Permi cabang dan anak cabang, 37 diantaranya adalah Permi putri. Rapat umum pertama khusus Permi putri dilaksanakan dalam konferensi Permi bulan Juli 1932 di Bukittinggi. Rasuna Said memimpin kegiatan tersebut bersama sekitar 2.000 kaum ibu yang hadir. Topik pembahasannya mengenai emansipasi wanita, kedudukan wanita dan adat Minang.<sup>28</sup>

Rasuna Said aktif memberikan kursus-kursus seperti berpidato dan latihan berdebat.<sup>29</sup> Ia sendiri dikenal sebagai ahli pidato (orator) dengan semangatnya yang berapi-api. Berkat kepiawaianya, ia menjadi satu-satunya anggota perempuan yang mendapat julukan “Singa Betina”.<sup>30</sup> Rasuna Said merupakan satu dari tiga perempuan

---

<sup>27</sup> Rosihan Anwar, *loc.cit.*

<sup>28</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 296.

<sup>29</sup> Disamping kegiatan tersebut, Permi yang bergerak dalam bidang pendidikan juga memberikan kursus pemberantasan buta huruf, Sekolah *Thawalib* kelas rendah, serta Normal Kursus. Lihat Kongres Wanita Indonesia. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 13.

<sup>30</sup> Haji Moechtar Loetfi dan Rasuna Said, keduanya jago pidato, mereka diberi julukan “Singa Minangkabau”. Isi pidato mereka yang galak membuat Belanda khawatir ketenteraman umum di Sumatra Barat menjadi terguncang. Lihat Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 1*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 96.

tokoh nasionalis paling keras di Sumatera Barat, dua diantaranya adalah Rasimah Ismail dan Ratna Sari.<sup>31</sup>

Permi telah membuka cabang sampai ke Tapanuli, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Rasuna Said kerap mewakili partainya untuk memberikan pidato dihadapan rakyat. Kemampuannya tersebut tidak lepas dari bimbingan gurunya Haji Udin Rahmani saat di *Sumatra Thawalib*. Rakyat datang berbondong-bondong demi mendengarkan pidato politiknya. Hal ini ternyata menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah Hindia Belanda sehingga di setiap aktivitas Permi selalu diikuti oleh agen PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*).<sup>32</sup>

Pidato-pidato Rasuna Said selalu menarik perhatian rakyat untuk mendengarkannya. Keberanian dan ketajaman ucapan yang dikeluarkan Rasuna Said tidak terpengaruh meski ada wakil PID yang memata-matainya. Ia sering menggunakan kata-kata sindiran untuk menggambarkan tindak kekejaman pemerintahan yang tengah berjalan saat itu. Wakil PID yang hadir saat kegiatan Permi tidak segan-segan

---

<sup>31</sup> White, Sally, *loc.cit.* Rasimah Ismail lahir tahun 1911 di Bukittinggi. Ia dikenal sebagai pejuang hak perempuan dan tokoh Permi yang pernah dipenjara di Bulu, Semarang. Ratna Sari pernah mengajar di perguruan Sekolah *Thawalib* dan *Diniyah*. Ia merupakan tokoh Permi yang pernah dikenai hukuman *spreekdelict*.

<sup>32</sup> *Ibid.* Agen PID merupakan polisi rahasia yang bertugas mencurigai orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan menyelidiki keterlibatan mereka dalam suatu kerusuhan. Mereka cukup mengamati, memperkirakan, dan bertindak untuk selanjutnya ditangkap, jika perlu dideportasi ke Boven Digul. Lihat Tobing, K.M.L., *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1986), hlm. 73.

memperingatkan bahkan menghentikan acara, apabila terdapat unsur yang dianggapnya melanggar ketenteraman umum.<sup>33</sup>

Rasuna Said memberikan pidato dalam rapat Permi di Padang Panjang pada tanggal 23 Oktober 1932 dengan judul “Langkah-langkah Menuju Kemerdekaan Rakyat Indonesia”. Ia menyampaikan tentang sejarah pergerakan nasional di Indonesia, selanjutnya ia berpendapat bahwa selama ini aturan-aturan yang dibuat Belanda telah menghancurkan mata pencaharian rakyat, merusak karakter dan nilai bangsa. Rasuna Said menambahkan pula bahwa “lebih baik kita meminta kepada Allah untuk mati daripada kita tidak melayani bangsa”.<sup>34</sup>

Permi mengadakan rapat umum di Payakumbuh pada tanggal 19 November 1932.<sup>35</sup> Rasuna Said yang berada disana berkesempatan untuk memberikan pidato. Ia menjelaskan bahwa salah satu kebijakan Permi ialah untuk memperlakukan imperialisme<sup>36</sup> sebagai musuh dan tidak akan bergabung dengan dewan yang didirikan oleh Belanda. Isi

---

<sup>33</sup> Kamajaya, *loc.cit.*

<sup>34</sup> White, Sally, *op.cit.*, hlm. 107-108.

<sup>35</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 275.

<sup>36</sup> Imperialisme merupakan usaha untuk mempersatukan kembali daerah-daerah jajahan yang mempunyai pemerintah sendiri dan menginduk pada Inggris. Kata imperialism memiliki makna yang sama dengan kolonialisme. Lihat Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 1-2.

pidato yang disampaikan ibu Permi itu ternyata mendapat teguran karena dianggap terlalu keras.

Perempuan Minang ini kerap menerima teguran, peringatan, bahkan perintah untuk berhenti saat berbicara di podium. Hal serupa pun terjadi saat ia menyampaikan orasinya di Payakumbuh. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk mengkritik dan menjelek-jelekan pemerintah Hindia Belanda. Rasuna Said secara terus terang menerangkan tindakan yang dilancarkan penjajah untuk memperbodoh dan memiskinkan bangsa Indonesia, serta menanamkan jiwa perbudakan yang menyebabkan rakyat menjadi sangat menderita, malas, dan tidak bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Rasuna Said dijemput oleh beberapa polisi untuk sementara ditahan di Payakumbuh, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1932 saat berada di Bukittinggi. “Singa Betina” ini dituduh telah menghasut dan mengintimidasi rakyat untuk mengadakan pemberontakan serta menanamkan rasa benci terhadap kolonialis Belanda.<sup>38</sup> Ia pun dikenakan tuduhan melanggar artikel 153 tentang larangan berbicara di muka umum atau yang disebut *spreekdelict*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Jajang Jahroni, *loc.cit.*

<sup>38</sup> Kongres Wanita Indonesia, *loc.cit.*

<sup>39</sup> Burhanuddin Daya, *loc.cit.* Lihat juga dalam White, Sally, *op.cit.*, hlm. 108. Rasuna Said menjadi perempuan pertama yang dikenai *spreekdelict* oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kasus *spreekdelict* ini selanjutnya diajukan ke pengadilan negeri Hindia Belanda (*landraad*) Payakumbuh, pada tanggal 28 Desember 1932. Rasuna Said didampingi pembelanya, S.A. Hakim. Masyarakat umum yang bersimpati pada Rasuna Said terus berdatangan hingga memenuhi bagian dalam dan luar gedung. Mereka sebagian berasal dari kota dan pesantren Islam di desa-desa. Situasi di dalam ruangan menimbulkan kegemparan tatkala setiap pertanyaan yang diajukan kepada Rasuna Said, dapat ia jawab dengan tegas tanpa ragu-ragu.<sup>40</sup>

Rasuna Said dimintai pertanggungjawaban atas semua ucapan yang ia keluarkan dalam pidato. Pertanyaan yang diberikan salah satunya tentang maksud dari kalimat berikut, “*selamat datang kepada anak laki-laki dan perempuan yang belum bebas, tapi akan bebas, dan pemerintah Belanda akan lenyap*”. Rasuna Said menjelaskan bahwa memang saat ini orang-orang Indonesia belum bebas tetapi cepat atau lambat akan mencapai kemerdekaan, seluruh dunia tahu bahwa orang yang memiliki hak akan merdeka, maka pemerintah Belanda yang sekarang berkuasa akan lenyap dan jatuh.<sup>41</sup>

Proses persidangan diakhiri dengan penetapan hukuman penjara dengan masa tahanan satu tahun dua bulan. Rasuna Said dianggap bersalah dan harus dihukum di penjara Bulu, Semarang, Jawa Tengah. Ia berangkat tanggal 9 Juni 1933 dengan menaiki kapal api SS *van*

---

<sup>40</sup> Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>41</sup> White, Sally, *op.cit.*, hlm. 109.

*Linskhoten* dari pelabuhan *Emma Haven* atau yang sekarang bernama pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Rasuna Said menerima banyak makanan dari perempuan setempat. Kepergian perempuan Minang ini pun diiringi lagu Indonesia Raya dan linangan air mata dari masyarakat yang hadir di pelabuhan.<sup>42</sup>

Berita tentang penangkapan Rasuna Said telah sampai ke tanah Jawa. Beberapa tokoh pergerakan disana turut prihatin sekaligus kagum dan memberikan dukungan kepada pejuang perempuan ini. Permi menerima surat dan telegram berupa dukungan dari sejumlah partai politik, bahkan secara personal dari Dr. Sutomo<sup>43</sup> yang menyebutkan bahwa, Rasuna Said merupakan model bagi para pemimpin dan pahlawan Indonesia.<sup>44</sup>

Surat kabar setempat kini mulai memuat berita tentang kasus *spreekdelict* yang menimpa Rasuna Said. Surat kabar lokal hingga Fikiran Ra'jat<sup>45</sup> asal Bandung pun tidak ketinggalan untuk merilis

---

<sup>42</sup> Jajang Jahroni, *loc.cit.*

<sup>43</sup> Dr. Sutomo (1888-1938) lahir di Loceret, Nganjuk. Tahun 1903 ia menempuh pendidikan kedokteran di *School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* (STOVIA) Batavia. Tahun 1911 setelah lulus, ia bekerja sebagai dokter di Jawa dan Sumatra. Bersama teman-temannya, ia mendirikan perkumpulan Budi Oetomo pada tahun 1908. Lihat Tim Redaksi Pustaka Timur, *Profil 143 Pahlawan Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2009), hlm. 143.

<sup>44</sup> White, Sally, *op.cit.*, hlm. 110.

<sup>45</sup> Fikiran Ra'jat merupakan media massa yang dipimpin oleh Soekarno di era revolusi. Beralamat di Astana Anjarweg No. 174, Bandung. Isinya memuat karangan-karangan ilmiah, kronik umum, serta rubrik tanya jawab yang terbit seminggu sekali.

berita tersebut. Tercatat dalam edisi nomor 24 yang terbit pada tanggal 9 Desember 1932, menuliskan sebagai berikut, "Dalam rapat oemoem P.M.I. di Padang seorang kaoem iboe bernama Rasoena Said telah kena spreekdelict dan ditahan preventief".

Pasca penangkapan terhadap Rasuna Said, beberapa aktivis perempuan Permi turut dikenai *spreekdelict* atas kasus yang sama, seperti Rasimah Ismail, Ratna Sari, dan Fatimah. Dua guru Sumatra *Thawalib* juga terkena larangan mengajar, mereka ialah Zainal Abidin Ahmad dan Duski Samad.<sup>46</sup> Berita ini disinggung lagi oleh surat kabar Fikiran Ra'jat dalam edisi nomor 35 yang terbit pada tanggal 24 Februari 1933, dengan judul berita "Rasoena Said dapat teman boeat 8 hari". Berikut kutipan dari surat kabar tersebut,

*Rasoena Said beloem lagi beberapa mendjalankan pengorbanannja, sekarang (6 Februari '33) telah mengiring di tempat itoe djoega [hotel prodeo di Pajakomboeh] Sdr. Mardiani Djali dan Fatimah Reno, doe a pengadjoer Islam nationalism Nahdatoelnisaijah P.N.N., P 8 hari lamanja, karena ditoedoeh beropenbaar zonder beritahoe dan membiarkan anak-anak dalem vergadering jang terseboet. Bertambah njata bagi kita sekarang bahwa pergerakan Ra'jat soedah dekat dan hampir dipoentjaknya. Diwaktoe kaoem Iboe telah berani mengorbankan dirinja dalem pergerakan Ra'jat tanda kemerdekaan soedah sangat dekat.*

*Ketahoei dan jakinlah!!!*

*Begitoe saudara Bsd. K. dari Pajakomboeh toelis pada kita.*

Soekarno selaku pemimpin surat kabar Fikiran Ra'jat menggunakan nama samaran Soemini, menggambarkan karikatur

---

<sup>46</sup> Jajang Jahroni, *Ibid.*

tentang penangkapan Rasuna Said. Ia memberi tajuk “Salam dari Pendjara” dengan keterangan berbunyi, *Saodara poeteri Rasoena Said kini meringkoek dalam penjara boeat satoe tahoen tiga boelan lamanja oentoek Indonesia Merdeka. Hidoepelah Indonesia Merdeka!*<sup>47</sup>

Penahanan terhadap Rasuna Said dan tokoh-tokoh lainnya merupakan salah satu langkah pemerintah Hindia Belanda untuk membungkam para pemimpin Permi. Selama berada di penjara Bulu, ia tetap diawasi dan sering dibujuk untuk berhenti dari dunia politik. Seorang kontrolur bernama Dr. Daniel van der Meulen<sup>48</sup> adalah orang yang membujuk Rasuna Said untuk keluar dari Permi.<sup>49</sup> Van der Meulen sesungguhnya telah melakukan *brainwashing* atau cuci otak terhadap Rasuna Said agar meninggalkan pergerakan nasional.

Van der Meulen hampir setiap malam mendatangi sel Rasuna Said untuk berdiskusi dan berakhir dengan bujukan agar jangan lagi

---

<sup>47</sup> Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 35. (Lihat lampiran 2, hlm. 130).

<sup>48</sup> Dr. Daniel van der Meulen (1894-1989) atau van der Meulen lahir di Laren, Lochem. Pakar keislaman ini merupakan seorang pejabat Belanda, pernah menjadi Asisten Residen di Palembang dan Makassar. Ia menuliskan pengalamannya saat membujuk Rasuna Said dalam buku yang berjudul *Hoort gjit die donder niet?* (Apakah Anda tak dengar bunyi petir itu?) yang terbit tahun 1977. Lihat Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 1, op.cit.*, hlm. 100.

<sup>49</sup> Rosihan Anwar, *Ibid*. Kontrolur merupakan jabatan terendah di daerah yang dijabat oleh orang Belanda. Tugas kontrolur yakni mengawasi barang atau tanaman ekspor, namun pada prakteknya merekalah yang menangkap rakyat yang dianggap keras kepala, sehingga kontrolur ditakuti rakyat. Lihat Mardjani Martamin, dkk, *Sejarah Kebangkitan, op.cit.*, hlm. 15-20.

berpolitik.<sup>50</sup> Ia menasihati perempuan Minang ini supaya terhindar dari hukuman penjara seperti yang tengah dialaminya sekarang. Percakapan keduanya selain berdiskusi tentang perpolitikan, ia juga mengorek sisi kehidupan rumah tangga Rasuna Said. Usaha merayu Rasuna Said selalu nol alias gagal. Van der Meulen pun tidak pernah jera membujuk perempuan ini, ucapannya antara lain sebagai berikut,

*Rasuna, karena perbuatan Anda sendiri, Anda akan dihukum. Saya akan mengajukan hal-hal yang meringankan. Usia Anda masih muda, Anda berbakat pidato, wajah Anda elok, tetapi semua ini tidak akan mencegah penghukuman. Pakailah waktu untuk berpikir mengenai kegagalan-kegagalan Anda. Usahakan berbuat sesuatu yang baik, dan janganlah kembali ke jalan politik.*<sup>51</sup>

Selama Rasuna Said berada di penjara Bulu, Semarang, pergerakan Permi semakin diawasi dan diperketat ruang geraknya. Belanda selanjutnya mengadakan kontrol terhadap segala macam bentuk penerbitan, pidato, dan khutbah di masjid-masjid. Pihak Belanda menggunakan *exorbitante-rechten*<sup>52</sup> dalam melancarkan pengawasannya tersebut. Tokoh-tokoh Permi tidak gentar meski

---

<sup>50</sup> Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 4, op.cit.*, hlm. 149.

<sup>51</sup> Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 1, loc.cit.*

<sup>52</sup> Hak eksorbitan (*Exorbitante-rechten*) yaitu hak istimewa bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda berdasarkan pasal 37 Hukum Tata Negara *Nederlandsch Indie*. Hak untuk melakukan penangkapan, pembuangan, penyiksaan, pemberangus dan pembredelan kepada setiap orang yang dicurigai mengganggu ketertiban umum. Lihat Tobing, K.M.L., *op.cit.*, hlm. 72-73.

aktivitas partainya terus dibatasi, justru mereka semakin berani untuk menyuarakan perlawanan.

Pada saat Gubernur Jenderal De Jong berkuasa di Sumatera Barat tahun 1932-1936, pemerintah bertindak lebih tegas lagi terhadap pergerakan politik disana. Aksi revolusioner Permi dianggap mengancam ketenangan mereka. Mukhtar Luthfi merupakan salah satu orator Permi yang dianggap menghasut rakyat sehingga ia ditangkap pada tanggal 11 Juli 1933. Pengasingan Mukhtar Luthfi ke Makassar ternyata belum mengamankan keadaan, maka larangan rapat diterapkan terhadap Permi berdasarkan surat De Jong No. 1 tanggal 4 Agustus 1933.<sup>53</sup>

Aktivitas Permi dimatikan pada permulaan September 1933, mulai dari kegiatan rapat, aksi-aksi melalui majalah, surat kabar, dan pamflet. Ilyas Ya'kub dan Djalaluddin Thaib<sup>54</sup> akhirnya turut ditangkap pada tanggal 7 September dan melalui Keputusan Pemerintah No. 15 tanggal 19 Juli 1934, keduanya dibuang ke Boven Digul.<sup>55</sup> Tempat khusus pengasingan ini terletak di tengah-tengah hutan Irian Barat, dikelilingi tanah-tanah rawa tempat nyamuk malaria

---

<sup>53</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, 276.

<sup>54</sup> Djalaluddin Thaib (1895-1959) lahir di Bukittinggi. Putra Haji Muhammad Thaib Datuk Rajo Melintang dan Siti Zalekha. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Surau Djembatan Besi, ia melanjutkan ke Mekah tahun 1914-1916. Ia aktif di perguruan *Sumatra Thawalib*, Sekolah *Diniyah* dan partai Permi. Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933*. (Ithaca: Cornell University Press, 1971), hlm. 64-65.

<sup>55</sup> Burhanuddin Daya, *loc.cit.*, lihat juga dalam Kamajaya, *op.cit.*, hlm. 79.

bersarang. Pada pertengahan 1933 Belanda mengeluarkan larangan berkumpul (*vergader verbod*), khususnya kepada dua partai yang dianggap berbahaya, Permi dan PSII.<sup>56</sup>

Keadaan didalam Permi kini mulai terombang-ambing setelah putra putri terbaiknya ditangkap. Empat orang perempuan utama Permi antara lain Rasuna Said, Rasimah Ismail, Ratna Sari, dan Fathimah, serta tiga orang putra terbaiknya, Mukhtar Luthfi, Ilyas Ya'kub, dan Djalaluddin Thaib. Para tokoh Permi lainnya mulai dilarang bepergian hingga bulan April 1934. Pada tahun 1935 segala aktivitas Permi dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>57</sup>

Rasuna Said telah selesai menjalani masa tahanannya di penjara Bulu, Semarang. Ketika kembali ke Padang, ia dikejutkan dengan berbagai kenyataan yang telah menimpa teman-teman dan partainya. Perasaannya sangat terpukul tatkala mengetahui para pemimpin Permi banyak yang dipenjara dan diasingkan. Ruang gerak Permi yang semakin dibatasi praktis membuatnya tidak dapat berkutik lagi. Jalan terakhir yang mampu diambil tinggallah mengalah terhadap tekanan

---

<sup>56</sup> Permi dan PSII merupakan partai terbesar dan memiliki pengikut paling banyak baik di dalam dan di luar Sumatera Barat. Pemerintah kolonial memandang Permi sebagai musuh paling berbahaya sebab partai ini mengkombinasikan antara radikalisme dan agama, serta memiliki tokoh-tokoh yang tak tertandingi. Lihat Kahin, Audrey, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>57</sup> Anonim, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950*. (Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau, 1978), hlm. 55.

Belanda, Permi kemudian dinyatakan bubar pada tanggal 18 Oktober 1937.<sup>58</sup>

Rasuna Said terlanjur kecewa dengan para pengurus Permi yang telah kehilangan nyali. Meski dirinya tidak setuju dengan pembubaran partai, tetapi sudah tidak ada lagi yang mampu diharapkan sehingga ia memutuskan untuk pergi. Rasuna Said berharap dengan kepergiannya menuju tempat yang baru, akan menumbuhkan semangat perjuangan yang baru pula disana. Ia akhirnya pindah ke kota Medan, Sumatera Utara untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya.<sup>59</sup>

### 3. Pemuda Nippon Raya

Hindia Belanda memiliki daya tarik yang luar biasa dimata pemerintah asing, khususnya Jepang. Terlepas dari kekuasaan Belanda, kini giliran pemerintah Jepang yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Bagi Jepang, potensi minyak bumi yang tersimpan disini dapat menjamin pasokan bahan bakar untuk kebutuhan mesin-mesin perang mereka.<sup>60</sup> Diawali dengan propaganda sebagai saudara tua serta berbagai harapan untuk segera

---

<sup>58</sup> Kahin, Audrey, *op.cit.*, hlm. 112. Mengenai proses pembubaran PERMI lihat Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 277.

<sup>59</sup> Kamajaya, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>60</sup> Anhar Gonggong, Pemuda dan Gerakan Bersenjata: Indonesia Masa Pendudukan Jepang, *Prisma*, Volume 30, No. 2. 2011, hlm. 55.

mengakhiri penjajahan Belanda, Jepang pun mulai melancarkan kebijakannya.<sup>61</sup>

Pemerintah Belanda telah memprediksi kedatangan Jepang dan untuk mempersiapkan apabila terjadi perang besar, Belanda membentuk dan melatih pasukan militer khusus seperti Pasukan Pengawal Negeri (*Stadswacht*), Pasukan Pengawal Kota (*Landswacht*), dan Pasukan Pengawal Udara (*Luchtbeschermings Dienst*).<sup>62</sup> Ketika Jepang benar-benar datang, tentara Jepang membombardir kota Padang dan pelabuhan Teluk Bayur. Hal ini membuat pasukan Belanda lumpuh total sehingga tidak memberikan perlawanan, kecuali melakukan taktik bumi hangus sebelum meninggalkan Sumatera Barat.

Tidak lama setelah berhasil menduduki Hindia Belanda, Jepang membaginya menjadi tiga wilayah kekuasaan, antara lain Jawa, Madura dan Sumatera. Sumatera, memiliki tempat tersendiri di mata Jepang dibandingkan wilayah Asia Tenggara secara umum dan di Hindia Belanda pada khususnya. Sumatera adalah “daerah inti” (*nuclear zone*) di Kawasan Selatan. Admiral Nakamura, seorang perwira tinggi Jepang dalam invasi ke Kawasan Selatan, mengatakan

---

<sup>61</sup> Jepang melakukan ide propaganda Asia Timur Raya dengan tujuan menarik simpati rakyat. Mata-mata Jepang berkeliaran memberitakan akan adanya suatu perubahan besar dengan jalan berbisik-bisik dari mulut ke mulut. Ditambah gerakan Tiga A (Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon cahaya Asia) Jepang akan menolong bangsa Indonesia karena sama-sama orang Asia untuk mengusir bangsa kulit putih. Lihat Mardjani Martamin, dkk, *op.cit.*, hlm. 172.

<sup>62</sup> Jajang Jahroni, *loc.cit.*

bahwa “mundur dari Sumatera berarti kehilangan seluruh Hindia Belanda.”<sup>63</sup>

Jepang memulai invasinya ke Sumatera pada bulan Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang.<sup>64</sup> Pada tanggal 17 Maret 1942 tentara Jepang memasuki kota Padang dan sepuluh hari kemudian komandan militer Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat. Fokus utama tentara pendudukan Jepang adalah untuk memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatera, sehingga mereka dapat memanfaatkan ladang minyak di dekat Palembang dan perkebunan karet di Sumatera Timur.<sup>65</sup>

Pada masa kolonial Belanda, Pulau Jawa dianggap sebagai jantung kekuasaannya atau dengan istilah lain disebut “*the cradle of colonialism*”. Hal ini terlihat dari segi pembagian daerah administrasi yang berpusat di Batavia (sekarang Jakarta) serta kepentingan ekonomi lainnya. Kini, ketika Jepang mulai berkuasa, Jawa tinggallah masa lalu, sedangkan Sumatera adalah daerah masa depan untuk mengeruk keuntungan ekonomi kolonial. Memasuki babak yang baru

---

<sup>63</sup> Mestika Zed, *Giyûgun, Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera*. (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 12.

<sup>64</sup> Sebelum Jepang memasuki daerah Sumatera, tanggal 10 Januari 1942 daerah Tarakan, Minahasa, Sulawesi, Timor, Balikpapan, dan Ambon lebih dulu diduduki Jepang. Bulan Februari menyusul Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Tanggal 1 Maret Jawa, Banten, Indramayu, Juana, Kranggan. Tanggal 5 Maret giliran Jakarta dan 8 Maret 1942 Bandung. Lihat Mardjani Martamin, dkk, *op.cit.*, hlm. 170.

<sup>65</sup> Kahin, Audrey, *op.cit.*, hlm. 135.

ini, Rasuna Said aktif dalam Pemuda Nippon Raya, *Giyûgun*, serta Komite Nasional Indonesia.

Masa pendudukan Jepang diklaim sebagai masa paling kelam yang dirasakan penduduk pribumi. Terlepas dari kekejamannya, Jepang telah memberi harapan untuk mengakhiri penjajahan Belanda dengan membentuk berbagai lembaga, khususnya bagi warga pribumi usia muda atau yang dikenal sebagai pemuda. Para pemuda mulai dikelompokkan dan dilatih dalam organisasi kemiliteran seperti Pembela Tanah Air (PETA), *Heiho* dan *Giyûgun*.<sup>66</sup> Organisasi ini bertujuan untuk membantu dan melapis pertahanan pasukan Jepang menghadapi kemungkinan serangan mendadak Sekutu.<sup>67</sup>

Sejumlah kelompok pemuda Sumatera Barat bergabung untuk menyatukan kekuatan yang kemudian diberinama Pemuda Nippon Raya. Chatib Sulaeman<sup>68</sup>, Soekarno beserta tokoh-tokoh terkemuka lainnya merumuskan kebijakan untuk bekerjasama dengan Jepang.

---

<sup>66</sup> Pembela Tanah Air (PETA) merupakan kesatuan militer bentukan Jepang. Berdiri tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat *Osamu Seirei* No. 44, sebagai Tentara Sukarela. Pusat pelatihan PETA berada di kompleks militer Bogor. *Heiho* merupakan pasukan tentara pembantu bentukan Jepang yang terdiri dari bangsa Indonesia. Berdiri tanggal 2 September 1942 berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Lihat Suhartono, *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>67</sup> Anhar Gonggong, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>68</sup> Chatib Sulaeman lahir tahun 1906 di Sumpur, Padang Panjang. Putra Haji Sulaeman dan Siti Rahma. Menempuh pendidikan dasar di Padang tahun 1912-1917. HIS *Adabiah* tahun 1917-1919. Menamatkan pendidikan MULO di Padang tahun 1919-1921. Ia berkecimpung dalam gerakan politik, ekonomi, dan musik. Ia ikut bertanggung jawab atas pembentukan *Giyûgun* Padang. Lihat Mestika Zed, *op.cit.*, hlm. 58. Lihat juga dalam Kahin, Audrey, *op.cit.*, hlm. 71.

Pemuda Nippon Raya sebenarnya memiliki tujuan untuk menyatukan semua kekuatan pemuda demi memperjuangkan kemerdekaan dan melindungi mereka agar jangan terlalu dekat dengan pengaruh Jepang.<sup>69</sup> Pengurus Pemuda Nippon Raya terdiri dari Chatib Sulaeman sebagai ketua, Mohammad Nasrun sebagai wakil, dan Leon Salim<sup>70</sup> sebagai sekretaris.

Rasuna Said tercatat turut berkontribusi dalam proses pembentukan organisasi Pemuda Nippon Raya.<sup>71</sup> Suatu waktu ia berhadapan dengan Mishimoto, tokoh asal Jepang yang mengatakan “sekarang hanya ada Asia Raya, tidak ada Indonesia Raya”. Rasuna Said menjawab “Indonesia Raya sudah ada tuan, walaupun apa yang akan terjadi”. Ia juga menambahkan, “ini dadaku, boleh Tuan menyebut Asia Raya, karena Tuan menang (perang), tetapi Indonesia Raya pasti ada disini” sambil menunjuk dadanya sendiri.<sup>72</sup>

Seiring berjalanannya waktu, pihak Jepang akhirnya mengetahui cita-cita sebenarnya dari Pemuda Nippon Raya, maka setelah

<sup>69</sup> Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. (Tanpa nama kota: Masyarakat Sejarawan Indonesia, 1979), hlm. 44.

<sup>70</sup> Leon Salim lahir tahun 1912 di Tiakar, Guguk, Dangung-dangung. Putra dari Salim, seorang petani dan seniman. Mengawali pendidikan Sekolah Desa pada Juni 1919, Sekolah Menengah sejak April 1922-1925. Ketika duduk dibangku *Vervolgsschool* Dangung-dangung, ia mengubah nama depannya dari Luin menjadi “Leon” (singa). Ia juga lulusan sekolah Sumatera *Thawalib*, Padang Panjang. Lihat Kahin, Audrey, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>71</sup> ANRI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 807, *loc.cit.*

<sup>72</sup> Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 331. Lihat juga dalam Kamajaya, *loc.cit.*

Soekarno pergi ke Jawa pada akhir bulan Mei 1942, perkumpulan ini dibubarkan. Para pemimpinnya, Chatib Sulaeman dan Leon Salim ditangkap pada tanggal 14 November 1942 dengan tuduhan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang padahal sebenarnya mereka menentang atau anti Jepang.<sup>73</sup> Para pemimpin Pemuda Nippon Raya ditahan selama delapan hari. Mereka kemudian dibebaskan karena pengaruhnya yang cukup besar sehingga akan beresiko terhadap keberadaan Jepang di mata rakyat.

#### **4. *Giyûgun***

Pemerintah Jepang membentuk organisasi massa dengan mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan pembentukan tentara sukarela di Jawa, Sumatera, Borneo Utara, dan Malaya tanggal 29 Juni 1943.<sup>74</sup> Pemerintah Jepang juga memerintahkan tentang pembentukan Tentara Rakyat pada awal Oktober 1943. Jika di Jawa ada *Jawa Hokokai*, maka di Sumatera disebut *Giyûgun*. *Giyûgun* lebih populer disebut sebagai “Laskar Rakyat” atau “Tentara Rakyat Sukarela”.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan*, op.cit., hlm. 141.

<sup>74</sup> Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan*, op.cit., hlm. 53.

<sup>75</sup> Mestika Zed, op.cit., hlm. 27. *Giyûgun* (baca: Giyugung), *giyu*= sukarelawan, *gun*= korps/tentara.

Yano Kenzo<sup>76</sup> memanggil tiga orang petinggi daerah Sumatera Barat sebagai penanggung jawab perekrutan massa *Giyûgun*. Tiga orang yang dipanggil antara lain Chatib Sulaeman (wakil kaum cendekiawan), Ahmad Dt. Simarajo (wakil kaum adat) dan H. Mahmud Yunus (wakil kaum ulama).<sup>77</sup> Langkah berikutnya untuk membina *Giyûgun* diharapkan akan lebih mudah dengan diperolehnya kekuatan dari tiga orang tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan panitia persiapan pembentukan *Giyûgun* pada tanggal 5 Oktober 1943 di Padang, maka terbentuklah susunan pengurus hariannya. Chatib Sulaeman terpilih sebagai Ketua merangkap Bagian Umum, Haji Mahmud Junus dan Ahmad Dt. Simaradjo sebagai anggota, sementara dari perwakilan perempuan ada Rasuna Said sebagai Seksi Wanita.<sup>78</sup>

Chatib Sulaeman mendorong berdirinya *Giyûgun Konsetsu Honbu* (Markas Besar Pembentukan *Giyûgun*) pada bulan Oktober 1943. Proses seleksi dilakukan oleh pihak Indonesia dan Jepang ditempat tersebut berdasarkan status, pendidikan, kesehatan dan masih

---

<sup>76</sup> Yano Kenzo memangku jabatan Gubernur Sumatera Barat pada bulan Agustus 1942. Ia mantan gubernur *prefecture* (wilayah Kecamatan) Toyama, Jepang. Yano merupakan sosok independen yang kagum dengan adat budaya Minangkabau. Ia mendirikan organisasi Kerukunan Minangkabau, Balai Penyelidikan Masjarakat Minangkabau, serta Madjelis Islam Tinggi. Lihat Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan, op.cit.*, hlm. 142.

<sup>77</sup> Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>78</sup> Mestika Zed, *op.cit.*, hlm. 57. Susunan lengkapnya diberitakan oleh surat kabar *Kita Sumatora Simbun* yang terbit pada hari Senin, 11 Oktober 1943.

dalam rentang usia 25-30 tahun.<sup>79</sup> Para pemimpin adat dan agama di desa-desa mendukung para pemuda untuk bergabung sebagai panggilan agama dan tanah air. Tugas utama *Giyûgun* adalah mempertahankan pantai. Mereka beroperasi dalam kompi-kompi kecil disepanjang pantai Air Bangis di utara sampai di Muko-Muko di selatan.<sup>80</sup>

Organisasi perempuan turut memberikan sumbangsih tenaganya, terutama dalam bidang logistik. Dipimpin oleh Rasuna Said, Ratna Sari, dan Rahmah El Yunusiyah dibentuklah bagian seksi wanita yang diberinama *Hahanokai*.<sup>81</sup> Tugas para perempuan disini ialah mengumpulkan bahan makanan, pakaian, dan menyelenggarakan berbagai bentuk dukungan moral, sosial maupun kesejahteraan.<sup>82</sup> Masalah logistik merupakan salah satu unsur paling penting yang dibutuhkan dalam situasi pertempuran, dengan demikian keseimbangan antara kekuatan senjata dan fisik para tentara perlu diperhatikan.

Proses penggembangan selama latihan *Giyûgun* nantinya akan berpengaruh besar terhadap penanaman karakter perjuangan

<sup>79</sup> Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan*, op.cit., hlm. 54.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>81</sup> White, Sally, *op.cit.*, hlm. 114.

<sup>82</sup> Kongres Wanita Indonesia, *loc.cit.* Lihat juga dalam Burhanuddin Daya, *op.cit.*, hlm. 332.

kemerdekaan.<sup>83</sup> Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyah, Leon Salim, Ratna Sari dan tokoh-tokoh lain giat melakukan propaganda untuk membentuk kader-kader baru. Mereka yang telah menerima berbagai latihan dalam *Giyûgun* selanjutnya akan masuk dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>84</sup>

## 5. Komite Nasional Indonesia

Kemunduran militer Jepang mulai terasa dimana terjadi inflasi<sup>85</sup> yang parah sejak memasuki tahun 1944. Menjelang minggu-minggu akhir masa pendudukan Jepang, pada tanggal 9 Agustus 1945 Marsekal Terauchi<sup>86</sup> mengundang Soekarno dan Hatta untuk bertemu di Dalat, Vietnam. Kesempatan tersebut ia gunakan untuk

---

<sup>83</sup> Chatib Sulaeman selaku pemimpin sadar betul akan bahaya pendidikan Jepang. Para pemuda telah ditanamkan nilai-nilai dan pandangan hidup ke-Jepangan daripada menerima kesetiaan dan tradisi ke-Indonesiaan. Beruntung, Jepang memberikan ijin kepada para pemimpin Minangkabau untuk memilih calon *Giyûgun*. Lihat Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan*, op.cit., hlm. 54.

<sup>84</sup> Kamajaya, op.cit., hlm. 82.

<sup>85</sup> Inflasi merupakan kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 534. Pada saat itu penguasa militer Jepang meningkatkan suplai uang dan menuntut lebih banyak lagi pada rakyat Sumatera seperti pasokan bahan makanan hingga tenaga rakyat untuk jadi kuli.

<sup>86</sup> Terauchi Hisaichi (1879-1946) lahir di Yamaguchi, Jepang. Putra sulung Perdana Menteri Terauchi Masatake. Menempuh pendidikan di Akademi Militer Kekaisaran Jepang tahun 1900, kemudian ditugaskan dalam Perang Rusia-Jepang. Pasca memimpin penyerbuan Asia Tenggara, ia dipromosikan menjadi Marsekal Medan (jabatan diatas Jenderal).

menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dengan Soekarno sebagai kepala negara dan Hatta sebagai wakilnya.<sup>87</sup>

Sejak proklamasi dibacakan, muncul inisiatif dari rakyat untuk mendirikan komite-komite kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menghimpun kehendak rakyat dalam satu kemauan yang bulat. Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945, sehingga diperlukan alat menuju negara demokrasi dengan membentuk perangkat negara.<sup>88</sup>

Komite kemerdekaan yang diinginkan rakyat akhirnya ditetapkan dalam pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan Bantuan Komite Nasional.” Lembaga ini kemudian diberi nama Komite Nasional Indonesia (KNI).<sup>89</sup>

Aturan Peralihan diatas menjadi dasar hukum pembentukan Komite Nasional Pusat atau sering disebut Komite Nasional Indonesia

---

<sup>87</sup> Lihat Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. (Jakarta: Tintamas, 1970), hlm. 20-27.

<sup>88</sup> Adam Malik, *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*. (Jakarta: Widjaya, 1976), hlm. 100.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Pusat (KNIP). Pasca proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Moh. Hatta mendesak pembentukan KNIP di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di masing-masing karesidenan. KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia.<sup>90</sup> Pemuka masyarakat Sumatera Barat menyambut baik berita tersebut, dan segera dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat (KNID-SB) pada tanggal 27-29 Agustus 1945 di Padang.<sup>91</sup>

Rasuna Said sebelum bergabung dalam KNIP, ia mengikuti pembentukan KNID-SB pada tanggal 31 Agustus 1945.<sup>92</sup> Pembentukan lembaga ini merupakan wujud pengakuan rakyat Sumatera pada umumnya, terhadap proklamasi kemerdekaan dan kedua pemimpinnya, Soekarno dan Hatta. Anggota KNID-SB seluruhnya berjumlah 41 orang. Lima dari 41 orang tersebut adalah perempuan, yaitu Rasuna Said, Syamsidar Yahya, Zubaidah Munaf, Hapipah Lanjunin, dan Chailan Sjamsoe.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Marbun, B.N., *DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1992), hlm. 75.

<sup>91</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 13. Penulisan Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat selanjutnya akan menjadi KNID-SB.

<sup>92</sup> Kongres Wanita Indonesia, *loc.cit.*

<sup>93</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 44.

KNID-SB menyelenggarakan sidang pelno pertamanya di Padang pada tanggal 1 Oktober 1945, sidang ini memilih Mohammad Sjafei<sup>94</sup> sebagai Residen Sumatera Barat yang pertama.<sup>95</sup> Rasuna Said selaku anggota aktif melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk memberi motivasi dan semangat kepada rakyat. Hal tersebut memberikan dampak positif terutama dalam menumbuhkan semangat perjuangan.

Kegiatan berkunjung dengan terjun langsung ke lingkungan masyarakat, selain membangkitkan semangat juga bertujuan untuk melebarkan sayap Komite Nasional Indonesia. Proses kaderisasi ini akhirnya mampu membentuk Komite Nasional Indonesia Kawedanan dan Nagari. Rasuna Said yang tergabung didalamnya memiliki peran yang besar dalam pergerakan daerah, sehingga ia disegani dan selalu dilibatkan dalam berbagai urusan di Sumatera Barat.

## B. Perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said di Bidang Pendidikan

Menjelang pergantian abad ke-20 banyak orang tua menolak pendidikan Belanda karena sekolah tersebut menggabungkan murid laki-laki dan perempuan. Hal ini dipandang oleh para pemimpin agama dan adat sebagai suatu ancaman serius terhadap budaya Minangkabau. Pro

---

<sup>94</sup> Mohammad Sjafei (1896-1966) lahir di Ketapang, Kalimantan Barat. Anak angkat dari Ibrahim Marah Soetan dan Andung Chalijah. Pendidikannya diperoleh di *Kweekschool*, Fort de Kock (Bukittinggi sekarang) tahun 1908-1914. Dialah pendiri dan kepala sekolah INIS Kayutanam. Jabatan sebagai residen ia letakkan pada tanggal 15 November 1945 dan kembali sebagai pendidik.

<sup>95</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 13. Residen (residensi atau karesidenan) merupakan istilah untuk penguasa tertinggi di daerah, diangkat oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja. Berkuasa secara otokrasi dalam daerahnya.

dan kontra pun muncul, pihak yang menolak beralasan, perempuan harus kembali ke kampungnya untuk menjaga harta pusaka yang diwariskan kepadanya. Pihak yang setuju beralasan, perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan potensi diri agar mampu dan lebih siap untuk menjalankan tugas yang dibebankan adat.<sup>96</sup>

Keyakinan akan adat yang kuat menimbulkan perdebatan dalam diri perempuan saat itu. Sebagian dari mereka tetap berpegang teguh pada apa yang dikhawatirkan setiap orang tua namun, tidak sedikit pula yang berpikir untuk keluar melihat luasnya dunia pendidikan. Perempuan tersebut ialah Rasuna Said. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh pendidikan karena menurutnya, kemajuan kaum wanita tidak hanya didapat dengan mendirikan sekolah, tetapi harus disertai perjuangan politik.

Rasa kepedulian Rasuna Said pada dunia pendidikan mulai tertanam saat dirinya menjadi murid di Sekolah *Diniyah*. Sekolah tersebut memiliki tradisi dimana setiap murid harus belajar untuk mengajar murid-murid di tingkat bawahnya.<sup>97</sup> Rasuna Said saat berada di kelas lima dan enam, diberi tugas untuk mengajar di kelas adik tingkatnya. Hasilnya, ia mampu menjalankan tugas dengan baik dan lancar.

---

<sup>96</sup> Lindayanti, “Perempuan Minangkabau dalam Panggung Politik”. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah FIS UNY pada hari Rabu, 16 November 2016, hlm. 3.

<sup>97</sup> Kamajaya, *loc.cit.*

Pendiri Sekolah *Diniyah*, Zainudin telah meninggal dunia sehingga perjuangannya dalam memajukan sekolah dilanjutkan oleh adiknya yaitu Rahmah. Rahmah telah memperoleh ijin dari kakaknya untuk mendirikan Sekolah *Diniyah Putri*. Sekolah ini resmi berdiri tanggal 22 Nopember 1967. Sistem pendidikan yang diterapkan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal di sekolah dan pendidikan dalam asrama. Peraturan sekolah disini mengharuskan para pelajar berpakaian tertutup.<sup>98</sup>

Sekolah *Diniyah Putri* berkembang dengan pesat dengan jumlah gedung dan kurikulum pelajaran yang terus diperbaiki. Rahmah memiliki prinsip bahwa ia tidak mau menerima subsidi yang sering ditawarkan Belanda kepadanya. Rahmah juga tidak ingin sekolah ini bernaung di bawah partai politik maupun organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sebagainya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa bangsa pribumi bisa berusaha sendiri.<sup>99</sup>

Perselisihan antara kaum muda dan kaum tua tengah bergejolak di tahun 1930.<sup>100</sup> Kegiatan-kegiatan politik di kalangan guru Minangkabau

---

<sup>98</sup> Pakaian tertutup artinya menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak boleh kelihatan rambutnya, pakaian harus longgar dan tidak tembus pandang. Lihat Ajisman, *Rahmah El Yunusiyah: Tokoh Pembaharu Pendidikan dan Aktivis Perempuan di Sumatera Barat*. (Padang: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002), hlm.51.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>100</sup> Kaum muda umumnya merupakan alumni Sekolah *Thawalib* yang cenderung berpikir progresif atau modernis. Kelompok ini mantan anggota Permi. Sedangkan, kaum tua alumni dari surau-surau ulama tua dan Sekolah Persatuan *Tarbiyah Islamiah* (Perti). Mereka berpikir konservatif atau tradisional. Umumnya kaum tua beraliran politik dari partai Perti dan PPTI. Lihat Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 20-21.

pun turut meningkat. Rasuna Said merupakan salah satu pengajar di Sekolah *Diniyah* Putri kala itu. Ia dan Rahmah telah lama menjalin pertemanan, termasuk sebagai sesama anggota pengajian di Surau Djembatan Besi. Rahmah diajak melakukan kegiatan politik oleh Rasuna Said. Rahmah dengan tekad awalnya yang bulat kemudian menolak ajakan tersebut dengan lembut.<sup>101</sup>

Dua perempuan Minang ini berdua pendapat tentang pentingnya pendidikan politik untuk murid-murid di sekolah. Bagi Rahmah selaku pendiri dan kepala sekolah,

*Politik untuk murid-murid adalah kecintaan seseorang kepada tanah air, harus didasarkan kepada iman yang tebal dalam dada setiap orang. Kalau iman tidak ada, maka politik dapat menjadi bumerang, yaitu akan menentang dan menghancurkan agama.*<sup>102</sup>

Rahmah menegaskan bahwa pelajaran agama jauh lebih penting dari pelajaran apapun. Prinsip untuk tidak melibatkan sekolah dengan paham politik telah ia tanamkan pada murid-muridnya. Ringkasnya, tidak perlu memberikan tekanan yang khusus pada teori berpolitik sebagai tambahan kepada murid-murid.

Berbeda dengan pandangan Rasuna Said yang mengemukakan bahwa setidaknya seorang pelajar perlu dilengkapi dengan berbagai macam kepandaian untuk mereka yang akan berkecimpung dalam

---

<sup>101</sup> Ajisman, *op.cit.*, hlm. 60. Hal demikian dianggap cenderung menempatkan Sekolah *Diniyah* Putri dibawah naungan partai politik yang dapat membahayakan sekolah dan para muridnya.

<sup>102</sup> Aminuddin Rasyad, “Rahmah El Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam”. *Prisma*, No. 8 Agustus Tahun VI, 1977, hlm. 107.

pergerakan.<sup>103</sup> Pendidikan politik penting untuk murid-murid sebagai upaya keluar dari belenggu penjajah. Tanpa sepenuhnya Rahmah, Rasuna Said memberikan pelajaran politik kepada murid-murid *Diniyah Puteri*. Hal tersebut dilakukan baik di dalam kelas maupun melalui perbincangan secara pribadi tentang pentingnya pendidikan politik dan perlunya partisipasi dari pelajar.<sup>104</sup>

Rahmah merasa cemas dengan perilaku murid-muridnya pasca ajaran politik yang diberikan Rasuna Said. Saat itu kepopuleran Rasuna Said jauh diatas Rahmah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dimata para murid. Dalam lingkungan masyarakat, seseorang yang berpartisipasi dalam pergerakan akan memperoleh penghargaan setinggi-tingginya, terlebih jika itu adalah perempuan. Tidak sedikit murid-murid yang mengandungi dan terpengaruh dengan pola pikir Rasuna Said.<sup>105</sup>

Perlahan Rahmah mulai melihat adanya sikap yang berbeda pada sebagian murid-muridnya. Beberapa peraturan berani mereka langgar seperti duduk sembarangan, berdiri tanpa memperhatikan sekelilingnya, dan meninggalkan sholat berjamaah bersama guru-guru. Diantara sebagian ajaran politik yang disampaikan Rasuna Said adalah kalimat “orang politik harus berani”. Rahmah yang selama ini selalu dihormati

---

<sup>103</sup> Ajisman, *loc.cit.*

<sup>104</sup> Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. (Singapore: Oxford University Press, 1973), hlm. 54.

<sup>105</sup> Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 73.

dan dipatuhi, pernah ditentang oleh muridnya dan dengan tegas mereka menjawab “kalau orang berpolitik itu harus berani”.<sup>106</sup>

Rahmah mencoba untuk berdiskusi mengenai situasi ini dengan Rasuna Said, namun gagal. Rahmah akhirnya meminta perantara dengan membentuk panitia kecil yang terdiri dari tiga orang.<sup>107</sup> Keputusan akhir menbenarkan pendapat Rahmah, tetapi untuk menjaga perasaan Rasuna Said hal ini tidak disampaikan padanya. Ketiga panitia tersebut meminta Sekolah *Thawalib* yang saat itu terdapat di Padang untuk meminta agar Rasuna Said mengajar disana, sehingga ia pun menarik diri dan pindah ke Padang.<sup>108</sup>

Pasca keluar dari Sekolah *Diniyah Putri*, Rasuna Said memperdalam ilmu pengetahuannya pada Haji Rasul, salah satu tokoh pembaharu dan pelopor gerakan kaum muda di Minangkabau. Pikiran Rasuna Said semakin terbuka, setelah mendengarkan tentang pentingnya pembaharuan pemikiran keagamaan dan kebebasan berpolitik.<sup>109</sup> Ia selalu menyempatkan hadir dalam pengajian yang dipimpin Haji Abdul Karim

---

<sup>106</sup> Ajisman, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>107</sup> Diketuai oleh Inyik Basa Bandaro, seseorang yang disegani, Angku Mudo dari pihak Rahmah, dan Haji Syu'aib dari pihak Rasuna Said. Lihat Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat, Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*. (Jakarta: Mizan, 1996), hlm. 438.

<sup>108</sup> Pada hari perpindahan, Rahmah dan Rasuna Said sama-sama menangis pilu, keduanya sudah seperti saudara walau berbeda pendapat, karena waktu itu *ukhuwah* sangat dijunjung tinggi. *Ibid.*

<sup>109</sup> Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 74.

Amrullah. Banyak kaum muda yang membanjiri pengajian tersebut dari berbagai daerah di Minangkabau.

Perjuangan Rasuna Said tidak sepenuhnya berhenti hanya karena perselisihan yang terjadi di Sekolah *Diniyah* Putri. Ia masih peduli akan usaha untuk memajukan pendidikan. Dirinya memberikan Kursus Pemberantasan Buta Huruf dengan nama Sekolah Menyesal, membuka *Sekolah Thawalib* kelas Rendah di Padang dan mengajar di *Sekolah Thawalib* Puteri, serta memimpin Kursus Putri dan Kursus Normal di Bukittinggi.<sup>110</sup> Ia selalu bicara pentingnya kesadaran politik rakyat dan pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Pasca terjadi perselisihan pendapat dan bubarnya Permi di tahun 1937, Rasuna Said memilih pergi ke Medan, Sumatera Utara. Medan menjadi lahan baru bagi Rasuna Said untuk berkiprah di bidang pendidikan. Ia mendirikan sekolah yang diberi nama Perguruan Puteri.<sup>111</sup> Lembaga pendidikan ini diperuntukkan khusus bagi perempuan. Disana murid-muridnya diajarkan betapa pentingnya peranan kaum perempuan dalam mencapai kemerdekaan. Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menapaki dunia pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>111</sup> Kamajaya, *op.cit.*, hlm. 80.

### C. Perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said di Bidang Jurnalistik

Rasuna Said memiliki ketertarikan di banyak bidang, dapat dikatakan pula bahwa ia merupakan sosok perempuan yang multi-talenta. Disamping berkontribusi di bidang organisasi dan pendidikan, Rasuna Said juga menorehkan gagasannya melalui tulisan. Penyebaran media cetak seperti surat kabar atau majalah pada masa ini memang tidak mudah. Penguasa kolonial terus memantau perkembangan pers sehingga para wartawan dan penulis Indonesia harus lebih berhati-hati.

Pasca menjalani hukuman di penjara Bulu, Semarang Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di *Islamic College*. Rasuna Said bergabung dalam kegiatan penulisan atau jurnalistik. Ia terpilih menjadi pimpinan redaksi atau pimred sebuah majalah. Majalah ini diterbitkan oleh murid-murid *Islamic College* sendiri yang diberi nama majalah “Raya”.<sup>112</sup> Pena Rasuna Said terkenal tajam yang menggambarkan keberaniannya yang menyala-nyala hingga majalah itu mampu membawakan cita-cita pendidikan sosial dan politik.

Rasuna Said mengkritik pemerintah kolonial Belanda yang telah menyengsarakan bangsa Indonesia melalui majalah tersebut. Tidak butuh waktu lama, majalah Raya muncul menjadi obor kaum pergerakan Minangkabau, menyalakan kembali semangat rakyat yang hampir padam. Disisi lain, Belanda pun tidak diam. Majalah Raya yang telah

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

berkembang luas akhirnya mulai diawasi polisi Belanda atau PID, bahkan ruang gerak mantan orang-orang Permi turut dipersempit.<sup>113</sup>

Rasuna Said sangat menyesalkan hal ini, terlebih sebagian tokoh-tokoh Permi justru tidak punya nyali. Permi akhirnya dinyatakan bubar pada tahun 1937. Rasuna Said memutuskan untuk pergi menuju Medan dengan harapan dapat melanjutkan perjuangannya disana. Ia mempunyai bakat yang mumpuni di bidang kepenulisan sebagai salah satu bekal perjuangan. Ia menuangkan bakat tersebut dengan menerbitkan sekaligus sebagai pimpinan redaksi sebuah majalah bernama Menara Poetri. Majalah ini berdiri pada tahun 1937 dengan fokus bahasan tentang keputrian dan keislaman.<sup>114</sup>

Menara Poetri memiliki karakteristik yang khas, isi beritanya selalu menerangkan secara tajam, langsung, tanpa kalimat sindiran. Majalah tersebut terbit seminggu sekali dan telah memiliki jangkauan yang luas.<sup>115</sup> Menara Poetri menjadi jembatan atau alat komunikasi bagi Rasuna Said untuk menyalurkan gagasan-gagasananya mengenai perempuan dan segala permasalahannya.<sup>116</sup> Majalah yang dipimpinnya

---

<sup>113</sup> Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>114</sup> Tribuana Said, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>115</sup> White, Sally, *op.cit.*, hlm. 112. Menurut Jajang Jahroni, majalah Menara Poetri terbit sebulan sekali, mengenai keterangan ini lihat Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 81. (Lihat lampiran 3, hlm. 131).

<sup>116</sup> Soedarmanto, J.B., *Jejak-jejak Pahlawan Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 244.

kini cukup mendapat tempat di hati masyarakat. Ia mempunyai semboyan khusus untuk majalahnya yang berbunyi, “ini dadaku, mana dadamu”.<sup>117</sup>

Rasuna Said mengisi rubrik “Pojok” dengan nama samaran Seliguri. Sasaran utama majalah ini ialah untuk menanamkan sikap antikolonialisme dalam diri perempuan. Seiring berjalannya waktu, Menara Poetri mengalami kemunduran yang disebabkan kurangnya pemasukan dana. Para pelanggan banyak yang tidak membayar dengan rutin hingga akhirnya Menara Poetri bangkrut. Karir di bidang jurnalistik terpaksa terhenti, namun pemilik nama samaran Seliguri ini masih kerap tampil di depan umum untuk memberikan pidatonya.

Surat-surat kabar pergerakan mulai saat itu menghadapi ranjau pemberangusan oleh penguasa kolonial. Sudjarwo Tjondronegoro menuliskan pada tahun 1938, bahwa tercatat dari tahun 1931 hingga 1936 ada sebanyak 27 harian yang ditindak penguasa kolonial.<sup>118</sup> Terbanyak di antaranya pers nasional, wartawan, dan penulis yang pernah dihukum oleh Belanda karena pikiran mereka, antara lain:

- a. R. Taher Tjindarbumi, pemimpin redaksi *Soeara Oemoem*, Surabaya, karena tulisannya tentang pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien.
- b. Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin karena tulisan mereka dalam *Daulat Ra'jat*.

---

<sup>117</sup> Kamajaya, *op.cit.*, hlm. 81. Lihat juga dalam Jajang Jahroni, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>118</sup> Tribuana Said, *op.cit.*, hlm. 41-43.

- c. Rangkayo Rasuna Said, pemimpin redaksi *Menara Poetri*, Medan yang dipenjarakan di Semarang.
- d. Bakrie Suraatmadja dan E.M. Dachlan, karena tulisan mereka dalam *Sipatahoenan*.
- e. Siregar, redaktur *Panggilan*, Samarinda.
- f. Yusuf Yahya, pemimpin redaksi *Gledek*, Bogor.
- g. Supangkat, Sujitno, Maruto Nitimihardjo dan Subari, pengasuh majalah *Indonesia Raja*.
- h. Samawi, Adam Malik, Bratanata, S.K. Trimurti, Abdul Hakim, dan lain-lain disekap dalam kamp tahanan Belanda menjelang penyerbuan pasukan Jepang ke Indonesia pada waktu Perang Dunia II.

Kaum wartawan Indonesia pada masa itu membentuk suatu perkumpulan sebagai wadah persatuan. Pada tahun 1906 berdiri Perhimpunan Pengarang Soerat Kabar Melajoe di Hindia Nederland (*Maleische Journalisten Bond*) yang diketuai oleh Belanda.<sup>119</sup> Badan tersebut tentu saja tidak mendapat dukungan dari wartawan pergerakan nasional. Tahun-tahun berikutnya muncul organisasi serupa seperti *Perserikatan Journalisten Asia* (1928), *Perkoempoelan Kaoem Journalist* (1931), *Indische Journalisten Bond* (1919) dan lain sebagainya. Perkumpulan wartawan yang tergolong kuat adalah Persatoean Djournalis Indonesia (Perdi) yang berdiri tahun 1933.

---

<sup>119</sup> Tribuana Said, *op.cit.*, hlm. 43.

Masa sebelum Rasuna Said berhenti memimpin majalah Menara Poetri, ia pernah bergabung dalam perkumpulan wartawan. Pada tahun 1938 di Medan berdiri persatuan wartawan muslimin yang diberi nama Wartawan Moeslimin Indonesia (Wamoesi). Organisasi ini mendapat dukungan dari beberapa wartawan di Surakarta. Wamoesi dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), M. Yunan Nasution, dan Rasuna Said.<sup>120</sup>

Peran Rasuna Said pada masa kolonial Belanda cukup mendapat perhatian dari publik karena kasus *spreekdelict* yang menimpanya. Masyarakat semakin mengenal perjuangan yang telah dilakukannya atas nama persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Masa-masa sulit selama di Padang hingga Medan telah membuktikan bahwa Rasuna Said bukan perempuan dengan impian belaka. Ia menginginkan kebebasan khususnya bagi kaum perempuan dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 44.